

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia di samping sandang, pangan dan perumahan. Kebutuhan manusia akan pendidikan seumur dengan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat mutlak, baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Jika sistem pendidikannya berfungsi secara baik dan optimal, maka akan tercapai segala kemajuan yang telah dicita-citakan. Namun sebaliknya, jika sistem pendidikannya tidak berjalan dengan baik dan kurang optimal, maka segala sesuatu yang dicita-citakan tidak akan mengalami kemajuan.

Menurut Hamalik (2010, hlm. 1) dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran mengatakan bahwa:

“Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan. Berbicara tentang proses pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan manusia yang berkualitas itu telah terkandung secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional.”

Senada dengan pendapat Hamalik, Tirtaraharja (2005, hlm. 225) dalam buku Pengantar Pendidikan mengatakan bahwa:

“Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dimana pembangunan itu selalu diupayakan agar tetap seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru, yang sebagiannya sering tidak dapat diramalkan sebelumnya.”

Sejalan dengan pengertian pendidikan tersebut, maka pemerintah menyusun sebuah langkah nyata dengan merumuskan sebuah tujuan pendidikan yang berakar dari nilai-nilai luhur bangsa. Tujuan pendidikan Indonesia itu telah tertulis dalam

Humaira Ulfah, 2015

*STUDI REALITAS IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI  
JENJANG SMA*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

“Tujuan Pendidikan Nasional berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berilmu, cakap dan kreatif, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pidarta, 2007, hlm. 12).”

Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam merubah dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi dalam pengembangan dunia pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendidikan di selenggarakan pada setiap satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi seharusnya dapat menjadi landasan pembentukan pribadi peserta didik yang lebih baik (Mulyasa, 2014, hlm. 13).

Namun pada kenyataannya mutu *output* pendidikan di Indonesia itu masih rendah. Rendahnya mutu pendidikan memerlukan penanganan secara menyeluruh, karena dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, juga sebagai wahana meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (Mulyasa, 2014, hlm. 13).

Upaya meningkatkan mutu pendidikan terus menerus dilakukan, setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan niatan untuk perbaikan sistem pendidikan. Meskipun pada kenyataannya setiap kurikulum memiliki kekurangan dan perlu dievaluasi serta diperbaiki agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik.

Menurut Kurniasih & Sani (2014, hlm. 1) bahwa pada dasarnya perubahan kurikulum dilakukan dengan dua cara, yakni mengganti beberapa komponen di dalam

kurikulum ataupun mengganti secara keseluruhan komponen-komponen kurikulum. Di Indonesia, semenjak pasca kemerdekaan tercatat sembilan kali perubahan kurikulum. Pada kurikulum periode 1947 sampai 1994 kurikulum di Indonesia bersifat sentralistik. Namun, ketika penerapan kurikulum KBK dan KTSP telah diberlakukan kurikulum secara desentralistik di mana sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum untuk diterapkan di setiap satuan pendidikan masing-masing.

Dari setiap perubahan kurikulum yang ada, tentu sulit untuk menampik bahwa setiap perubahan itu selalu saja ada alasan dan rasionalisasi dan yang paling sering dipergunakan adalah untuk penyesuaian dan menjawab perkembangan zaman. Kurniasih & Sani (2014, hlm. 31-32) mengemukakan bahwa:

“Perubahan dari kurikulum 1947 yang memberi perhatian pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain, disempurnakan menjadi kurikulum 1952 dengan nama Rentjana Pembelajaran Terurai lebih difokuskan pada isi pelajaran yang harus berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari adalah contoh perubahan atau penyempurnaan kurikulum karena penyesuaian dengan perkembangan zaman. Begitu juga ketika perubahan kurikulum 1975 yang mengusung satuan pelajaran (SP), mengenalkan tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat belajar, kegiatan belajar-mengajar, serta evaluasi”.

Tahun 2013 perubahan kurikulum kembali terjadi pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 menyatakan bahwa Implementasi Kurikulum 2013 telah dilaksanakan secara bertahap dan terbatas pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA di 295 kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan bersama Kementerian Agama Kurikulum ini akan diterapkan pada semua satuan pendidikan yakni di SD/MI kelas I, II, IV, dan V; SMP/MTs kelas VII dan VIII; dan SMA/ MA/SMK/MAK kelas X dan XI diseluruh Indonesia.

Perubahan KTSP menuju Kurikulum 2013 ini didasarkan pada perubahan pola pikir, keterampilan dan kompetensi guru serta kepemimpinan, kultur dan manajemen

sekolah. Implementasi Kurikulum 2013 sebagai bentuk perubahan pola pikir dan pola kerja guru pada setiap jenjang pendidikan tentunya mendapatkan respon yang beragam, baik dari pihak kepala sekolah, guru maupun dari elemen masyarakat lainnya. Hal tersebut di dasarkan pada berbagai kesiapan dan kematangan dalam managerial operasional KTSP pada masing-masing sekolah.

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak melakukan analisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, yang mana dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan teknologi (Mulyasa, 2014, hlm. 6).

Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan *akhlāq* mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan (Mulyasa, 2014, hlm. 6).

Dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, orang tua, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dimulai dari analisis karakter dan kompetensi yang akan dibentuk atau yang diharapkan muncul setelah pembelajaran (Mulyasa, 2014, hlm. 12).

Pada awal diberlakukannya Kurikulum 2013 ini (tahun ajaran 2014/2015) ternyata banyak menuai masalah. Menurut Alawiyah (2014, hlm. 9) bahwa persiapan Kurikulum 2013 ini dinilai terlalu terburu-buru dan tidak mengacu pada hasil kajian yang sudah matang berdasarkan hasil evaluasi KTSP, dan kurang memperhatikan kesiapan satuan pendidikan dan guru.

Hal tersebut tentunya membawa masalah yang besar apabila guru sebagai implementator kurikulum tidak mendapatkan bentuk pelatihan yang matang dari

Pemerintah. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa:

“Setiap guru harus memiliki empat kemampuan dasar dalam menunjang implementasi kurikulum, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Namun apabila melihat fakta di lapangan ternyata masih terdapat banyak keluhan guru terhadap implementasi kurikulum 2013 ini, baik menyangkut masalah perencanaan, proses pelaksanaan pembelajaran, maupun sistem penilaian yang terlalu memberikan banyak beban terhadap guru”.

Berdasarkan surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013, diputuskan bahwa sekolah yang telah menerapkan kurikulum 2013 selama tiga semester maka dapat melanjutkan kurikulum tersebut, sedangkan sekolah yang baru menerapkan selama satu semester maka kembali lagi menggunakan kurikulum KTSP.

Namun ternyata kebijakan tersebut tidak berlaku bagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah yang berada di Provinsi Jawa Barat yang tetap menggunakan kurikulum 2013. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama yang dilaksanakan oleh Menteri Agama dan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 bahwa Kurikulum 2013 tidak diberhentikan secara substansial menyatakan bahwa:

“(1) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tetap mengimplementasikan Kurikulum 2013 di semua sekolah; (2) Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan alokasi waktu sesuai dengan kurikulum 2013 dan proses penilaian disesuaikan dengan kebijakan satuan pendidikan masing-masing; (3) Kementerian Agama Kabupaten/Kota terus melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kurikulum 2013”.

Akan tetapi, selama penerapan kurikulum 2013 tiga semester dan dianggap masih kurang maksimal serta dipaksakan untuk diimplementasikan di seluruh Indonesia sehingga banyak menimbulkan permasalahan baru di antaranya, karena masih banyaknya guru yang belum mendapatkan pelatihan bimbingan teknis (BIMTEK) secara optimal dari dinas pendidikan, kurangnya memahami pendekatan

saintifik, banyaknya jumlah siswa dalam setiap kelas, sarana dan prasarana yang tidak memadai, ketersediaan buku ajar yang kurang bagi siswa, dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Studi Realitas Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti Jenjang SMA (Studi Deskriptif pada Berbagai Klasifikasi Guru SMA di Kota Bandung Tahun 2015)”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi standar perencanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung?
2. Bagaimana implementasi standar proses kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung?
3. Bagaimana implementasi standar penilaian kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung?
4. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala guru PAI pada implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung?
5. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung guru PAI pada implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti oleh guru PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung.

## 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi standar perencanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui implementasi standar proses kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui implementasi standar penilaian kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung.
- d. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala guru PAI pada implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung.
- e. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung guru PAI pada implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, berupa gambaran mengenai realisasi guru PAI terhadap implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Guru PAI

Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan masukan dan bahan evaluasi yang dianggap positif bagi perbaikan kualitas guru PAI itu sendiri.

#### b. Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam.



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya yang masih terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan baru mengenai realisasi guru PAI terhadap implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan bahan latihan dan rasa keingintahuan yang mendalam sebagai calon guru PAI mengenai realisasi guru PAI terhadap implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA Kota Bandung.

## **E. Struktur Organisasi**

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti membuat struktur organisasi. Adapun struktur organisasi dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi.

Bab II Kajian Pustaka, yang meliputi pembahasan mengenai konsep dasar kurikulum, konsep dasar PAI dan Budi Pekerti, Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMA serta perbedaan antara kurikulum 2013 dengan KTSP.

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.

Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi temuan penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi, yang meliputi simpulan, implikasi dan rekomendasi.